



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 20 September 2016

Nyali Jaksa di Kasus Dana Kepemudaan

Ada apa dengan Kejari Ambon?. Pertanyaan ini muncul rampai di publik menyusul dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai 1.648.096.000.yang tak jelas perkembangannya.

Pasca penggeledahan tim penyidik Kejari Ambon di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kantor Inspektorat Maluku, Selasa 1 Maret 2016 lalu, tidak ada progress penyidikan. Jalan di tempat. Pemeriksaan para eks pejabat Disdikpora tersendat. Sebut saja, bendahara dana dekonsentrasi, Welma Pattiasina yang sudah berulang kali dipanggil tetapi mangkir. Begitupun dengan bendahara pembantu, Jhon Masrikat. Tim penyidik Kejari Ambon terkesan tidak punya nyali untuk menghadirkan mereka. Padahal Korps Adhyaksa diberi kewenangan oleh undang-undang menggunakan instrumen hukum, kalau ada upaya untuk menghambat proses hukum.

Kejari Ambon yang dipimpin Robert Ilat terkesan tertutup. Entap apa penyebabnya. Apakah karena ada dugaan keterlibatan pejabat Pemprov Maluku?. Kalau iya, berarti Kejari Ambon tidak profesional dalam menegakan hukum. Gubernur Maluku, Said Assagaff sudah pernah menegaskan, kalau ia mendukung langkah hukum Kejari Ambon mengusut dugaan korupsi dana kepemudaan. Lalu apa yang ditakutkan?.

10 item kegiatan kepemudaan yang terindikasi korupsi yang tengah diusut yakni *satu*, sosialisasi kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Rp 151.780.000. *Dua*, pendaftaran dan seleksi PSP-3 Rp 37.115.000. *tiga*, orientasi keberangkatan dan kedatangan PSP-3 Rp 192. 650.000. *Empat*, dukungan pembekalan dan pemantapan PSP-3 Rp 343.820. 000. *Lima*, monitoring dan evaluasi PSP-3 Rp 94.652. 000. *Enam*, pemilihan PSP-3 berprestasi Rp 46.100.000. *Tujuh*, pengembangan dan pelatihan kepemimpinan pemuda Rp 150. 000.000. *Delapan*, peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan tingkat daerah Rp 164. 000.000. *Sembilan*, monitoring dan evaluasi kepramukaan Rp 18.000.000. *Sepuluh*, seleksi, pelatihan dan pembinaan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Rp 449.979. 000.

Robert Ilat dan jajarannya harus bersikap profesional. Jangan hanya *show of strength* saat penggeledahan, tetapi setelah itu berubah loyoh.

Masih penyidikan. Selalu saja jawaban itu yang diberikan oleh pimpinan Kejari Ambon. Tak ada yang baru yang dilontarkan ke publik. Tak jelas mengapa pimpinan Korps Adhyaksa terkesan tertutup. Sikap yang ditunjukkan tidak seperti penanganan kasus-kasus lainnya yang begitu



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

transparan. Tetapi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan berubah drastis. Pelit omong. Keterangan yang diberikan, itu... itu saja.

Apakah sikap pimpinan Kejari Ambon demikian karena ada intervensi kekuasaan?. Kalaupun iya, mengapa harus kendor. Justru siapapun yang menghalangi harus dilibas, jika sungguh-sungguh ingin menegakan hukum secara profesional.

Sikap tertutup Kejari Ambon sudah pasti memicu kecurigaan publik bahwa ada yang tak beres dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana kepemudaan. Aneh kan, pasca penggeledahan hingga kini tak ada kemajuan dalam penyidikan.

Kita hanya bisa berharap Kejari Ambon bekerja profesional. Tak ada kongkalikong yang akhirnya mengguburkan kasus ini dengan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang mengkhianati fakta. (*)